

Analisis Faktor Dan Motivasi Pada Kecurangan Laporan Keuangan Dan Audit Dalam Perspektif Audit Investigasi: Studi Kasus Korupsi E-Ktp

Dian Najwa Nurliyah¹, Nisrina Fatin², Sendy Leonardi³, Zaki Fadhil Maulana Sutrisno⁴

¹Universitas Pendidikan Indonesia

^{2,3,4}Universitas Negeri Malang

*sendy.leonardi.2104226@students.um.ac.id

Abstrak

Kasus korupsi skandal E-KTP yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011-2012 merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah politik negara ini, dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,31 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun. Tersangka utama, Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya, terlibat dalam pengaturan tender proyek bersama pengusaha Andi Agustinus. Investigasi oleh KPK mengungkap skema korupsi yang melibatkan suap dan penggelembungan anggaran. Penelitian ini mengkaji tahapan analisis data dalam kasus korupsi E-KTP melalui metode analisis isi kualitatif. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menganalisis pesan moral serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan dalam proyek tersebut. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dari sumber media daring yang terpercaya, diikuti oleh pengkodean data berdasarkan elemen fraud pentagon model. Analisis ini mengungkapkan tema dan pola yang mendasari tindakan korupsi, dengan fokus pada motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi pelaku.

Kata Kunci: Korupsi, skandal e-KTP, investigasi

Abstract

The corruption case of the E-KTP scandal that occurred in Indonesia in 2011-2012 was one of the biggest scandals in the country's political history, with total state losses reaching IDR 2.31 trillion from a budget of IDR 5.9 trillion. The main suspect, Setya Novanto, who at that time served as the General Chairperson of the Golkar Party, was involved in the project tender arrangement with businessman Andi Agustinus. An investigation by the KPK uncovered a corruption scheme involving bribery and budget inflation. This study examines the stages of data analysis in the E-KTP corruption case using qualitative content analysis methods. The aim is to identify and analyze moral messages and factors that contribute to fraud in the project. The

analysis process begins with data collection from trusted online media sources, followed by data coding based on the elements of the fraud pentagon model. This analysis reveals the themes and patterns underlying corrupt acts, with a focus on the motivation, opportunity, and rationalization of the perpetrators.

Keywords: *Corruption, e-KTP scandal, investigation*

PENDAHULUAN

Kecurangan (*Fraud*) dan Korupsi terus terjadi di berbagai bidang, baik di sektor publik maupun swasta. Indonesia telah menghadapi masalah korupsi selama bertahun-tahun, dan meskipun berbagai upaya telah dilakukan, korupsi tetap menjadi tantangan besar. Kasus-kasus korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan tetapi juga membuat penyempitan ruang partisipasi publik karena sistem yang korup telah memperparah tercapainya kesejahteraan. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan paling merusak, terus berlanjut di berbagai tingkatan pemerintahan.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk melawan korupsi. Selama lima tahun terakhir, *Corruption Perception Index 2023 (CPI)* Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia berada di angka 40, namun pada tahun 2022, skor tersebut menurun drastis menjadi di angka 34. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya persepsi korupsi di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta (*Transparency International Indonesia*, 2024). Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tren Korupsi, selama tahun 2023, modus operandi yang paling sering digunakan oleh tersangka korupsi adalah menjalankan atau merencanakan proyek palsu, menyalahgunakan anggaran pemerintah, dan membuat laporan pertanggungjawaban palsu (*Indonesia Corruption Watch*, 2024). Pada dasarnya, korupsi terkait erat dengan hampir semua kegiatan pemerintah.

Skandal korupsi e-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, dengan penyimpangan kerugian finansial yang signifikan dengan melibatkan berbagai sektor. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk proyek e-KTP, namun hanya Rp 2,6 triliun yang digunakan untuk pengeluaran riil. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah atau sekitar 49% dana proyek tersebut disalahgunakan oleh para penyelenggara negara (Akbar Maraendar et al., 2024). Awalnya dimaksudkan untuk memodernisasi sistem identifikasi penduduk, proyek ini justru menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana oleh berbagai pihak, termasuk pejabat tinggi dan kontraktor swasta. Dalam kasus ini, minimnya transparansi dan akuntabilitas memungkinkan pejabat pemerintah dan anggota legislatif terlibat dalam praktik korupsi tanpa khawatir akan penegakan hukum yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum membuka peluang bagi

para koruptor untuk beroperasi tanpa takut akan sanksi hukum yang tegas (Rahmat Aiman, 2024).

Meningkatnya angka korupsi di Indonesia maka diperlukan untuk melakukan pendeteksian kecurangan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menangani dan mengungkap penipuan di instansi pemerintah atau sektor publik adalah melalui audit investigasi dan penerapan akuntansi forensik. Audit umum atau audit laporan keuangan tidak cukup untuk mengungkap penipuan; dibutuhkan pendekatan yang lebih spesifik, seperti audit investigasi (Sundari Sapitri & Natasya Adelia Putri, 2024).

Menurut (Mohammad Iqbal & Helianti Utami, 2024) Audit investigatif dianggap efektif dalam mengungkap penipuan. Peran audit investigasi sangat penting dalam proses pengungkapan kecurangan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidah Dewi Anggraini et al. (2023), audit investigatif memiliki dampak positif yang signifikan dalam mendeteksi kecurangan di Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Peningkatan intensitas audit investigatif berbanding lurus dengan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan.

Untuk memahami dan memperluas pemahaman tentang elemen-elemen yang mendorong tindakan kecurangan juga faktor serta motivasi di balik kecurangan laporan keuangan dan audit, Pendekatan menggunakan teori *Fraud Pentagon* sangat relevan. Teori *Fraud Pentagon* adalah pengembangan dari teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, yang bertujuan untuk memahami dan mendeteksi tindakan kecurangan. Teori ini diperkenalkan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011. *Fraud Pentagon* menambahkan dua elemen baru ke dalam model sebelumnya, yaitu Kompetensi (*Competence*) dan Arogansi (*Arrogance*), selain tiga elemen yang sudah ada dalam *Fraud Triangle*: Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*) (Binus University, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas audit investigatif dalam mendeteksi dan menangani kecurangan. dengan fokus khusus pada kasus skandal e-KTP. Selain itu Melalui pendekatan teori *Fraud Pentagon*, penelitian ini berusaha memahami elemen-elemen yang mendorong tindakan kecurangan, serta faktor dan motivasi di balik kecurangan laporan keuangan dan audit.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud Pentagon

Teori *Fraud Pentagon* adalah pengembangan lebih lanjut dari dua teori sebelumnya, yaitu *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953 dan *fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolf & Hermanson pada tahun 2004. Teori ini dirumuskan oleh Crowe

Horwath pada tahun 2011 (Ulfah et al., 2017). *Fraud Pentagon* dianggap lebih canggih karena menambahkan elemen baru yang memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan/*fraud* (Sahla & Ardianto, 2023). Dalam penelitian ini, digunakan model skor kecurangan atau yang dikenal dengan F-Score, karena dinilai cukup efektif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan (Putra, 2022).

Model F-Score

Fraud pentagon theory, sebuah teori memperkenalkan model S.C.O.R.E. yang merupakan singkatan dari *Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, dan Ego*. Empat elemen pertama dari model ini (*Stimulus, Capability, Opportunity & Rationalization*) berasal dari *Fraud Diamond* (yang merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle*), elemen kelima yang ditambahkan yaitu ego, merupakan suatu perilaku superioritas yang muncul dari kesadaran pelaku yang percaya bahwa prosedur maupun kebijakan perusahaan yang tidak diterapkan (Angelina & Christian, 2022). Elemen ego ini sangat relevan dalam konteks kasus korupsi besar seperti E-KTP, dimana pelaku *fraud* memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar bahwa ia tidak akan terdeteksi (Novita, 2019). Analisis dari kelima elemen model S.C.O.R.E. menurut (Vousinas, 2019) dijelaskan di bawah ini:

1. Stimulus / Insentif

Stimulus atau insentif dapat menjadi tekanan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, baik dalam aspek finansial maupun nonfinansial. Tekanan ini dapat berupa kebutuhan finansial yang mendesak, desakan untuk mencapai target tertentu, frustrasi di tempat kerja, ambisi profesional yang ingin dicapai dengan cepat, dan terkadang dorongan egoistik untuk menunjukkan kemampuan mengalahkan sistem, serta faktor-faktor lainnya.

2. Capability (Kemampuan)

Capability didasarkan pada Kemampuan didasarkan pada karakteristik dan keterampilan individu yang berperan penting dalam menentukan apakah kecurangan akan terjadi ketika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi ada. Banyak kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya individu yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan kecurangan secara rinci.

3. Opportunity (Peluang)

Opportunity adalah kondisi yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kecurangan. Pelaku merasa yakin bahwa mereka dapat merencanakan dan melaksanakan tindakan *Fraud* tanpa terdeteksi.

4. Rationalization (Rasionalisasi)

Rationalization terkait dengan sikap terhadap kecurangan. Banyak pelaku kecurangan melihat diri mereka sebagai individu yang jujur dan biasa, bukan sebagai kriminal, sehingga mereka perlu mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka agar kecurangan tersebut bisa berlangsung lebih lama.

5. Ego

Ego mencegah untuk mengambil keputusan berdasarkan setiap dorongan internal dan moral, sehingga menghambat kemampuan kita untuk berfungsi secara optimal. Ego adalah elemen utama dalam memahami mengapa orang terdorong untuk melakukan kecurangan, dan dengan demikian ego menjadi komponen mendasar dari model S.C.O.R.E.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik penelitian yang memungkinkan kesimpulan yang dapat diulang dan diandalkan dari teks (atau materi bermakna lainnya) dalam konteks penggunaannya (Krippendorff, 2004). Tujuan metode ini adalah untuk memberikan penjelasan yang akurat tentang pesan atau teks yang sedang diteliti (Abanat et al., 2023). Metode ini mengamati fenomena komunikasi dengan merumuskan secara tepat apa yang diamati dan memastikan semua tindakan diarahkan pada tujuan tersebut (Ahmad, 2018). Peneliti menggunakan analisis isi untuk menggali makna yang terkandung dalam suatu komunikasi yang dapat diekspresikan melalui tanda, simbol, lambang, atau kriteria tertentu lainnya, kemudian memberikan interpretasi satu per satu. Masing-masing bentuk komunikasi tertulis, verbal, dan visual dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi indikator kecurangan, motivasi, dan kesempatan yang ada. Hasil analisis isi kemudian diinterpretasikan, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana setiap elemen model berperan dalam suatu tindakan kecurangan (Arafat, 2018).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh pengumpul data (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa dokumen. Dokumen adalah catatan dari penelitian sebelumnya, yang bisa berbentuk teks, gambar, atau tulisan hasil karya seseorang (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan meliputi penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, serta sumber dari media daring yang kredibel untuk mendapatkan ide dan memperkuat argumen.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan. Triangulasi ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk memperkuat keandalan hasil penelitian (Sugiyono, 2013).

Tahapan Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis isi kualitatif, yang bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis kasus korupsi E-KTP yang terdapat dalam media daring. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan menentukan pesan-pesan moral dari setiap kategori tema penelitian (Sartika, 2014). Tahapan yang dilakukan dalam analisis isi dimulai dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti perlu mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen atau sumber data yang relevan mengenai pemberitaan kasus E-KTP dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengkodean data, yaitu mengkategorikan data berdasarkan elemen-elemen dari *fraud pentagon* model. Setiap bagian teks yang sesuai dengan elemen-elemen tersebut diberi kode khusus. Selanjutnya peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data yang telah dikodekan, dan menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Tahap terakhir membuat kesimpulan dari hasil analisis isi, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai motivasi dan kesempatan yang terkait dengan kasus korupsi E-KTP. Tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat dipercaya (Arafat, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus E-KTP merupakan kasus mega korupsi yang terjadi pada badan legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP, kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 2,31 triliun. Dari total anggaran pemerintah sebesar Rp 5,9 triliun untuk proyek ini, hanya sekitar Rp 2,6 triliun yang benar-benar digunakan untuk pengeluaran sesuai kebutuhan proyek (Maraendar et al., 2024). Tersangka utama dalam kasus ini adalah Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golongan Karya saat itu, yang diduga memenangkan tender proyek e-KTP bersama pengusaha Andi Agustinus, alias Andi Narogong (Sovianti, 2019). Kasus ini berhasil menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah elit politik dan pejabat tinggi yang diduga menerima aliran dana dari proyek tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK berhasil mengungkap skema korupsi yang melibatkan praktik suap dan penggelembungan anggaran yang merugikan negara secara besar-besaran.

Melalui S.C.O.R.E Model, motivasi dan faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi tersebut adalah sebagai berikut

A. Stimulus

Stimulus adalah tekanan untuk melakukan kecurangan, baik bersifat finansial maupun non-finansial, yang dapat muncul dari kebutuhan keuangan yang tinggi, tekanan untuk memenuhi target, frustrasi di lingkungan kerja, ambisi profesional, atau keinginan egois untuk membuktikan kemampuan mengalahkan sistem, terutama dalam masa krisis ekonomi yang meningkatkan potensi tindakan kecurangan (Vousinas, 2019). Stimulus seringkali memicu individu untuk mengambil jalan pintas demi mempertahankan posisinya atau meningkatkan keuntungan pribadi. Stimulus, baik internal maupun eksternal, memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan risiko terjadinya penipuan atau kecurangan dalam suatu organisasi (Achmad et al., 2022). Oleh karena itu, stimulus merupakan salah satu faktor dasar yang perlu diketahui dalam penyelidikan maupun penelitian tentang fraud.

Dalam kasus korupsi E-KTP, dalam pemberitaan nasional, stimulus utama yang mempengaruhi para pelaku untuk melakukan korupsi adalah memperkaya diri sendiri. Dilansir dari berbagai berita yang berasal dari portal berita Kompas, Liputan6, serta saluran pemberitaan digital KompasTV, pelaku utama dari kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto, berusaha memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui pelolosan anggaran mega proyek E-KTP. Stimulus memperkaya diri sendiri dalam kasus Setya Novanto menjadi faktor utama yang mendorong tindak korupsi, di mana keuntungan pribadi yang besar menjadi motivasi utamanya. Dorongan untuk mengamankan sumber daya finansial secara ilegal melalui proyek E-KTP mencerminkan kebutuhan atau keinginan kuat untuk memperoleh kekayaan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus berbasis kepentingan pribadi sering kali cukup kuat untuk mendorong seseorang melanggar etika dan hukum, bahkan dalam skala korupsi besar.

Selain memperkaya diri sendiri, stimulus yang dialami oleh pelaku besar lain dalam kasus korupsi E-KTP adalah tuntutan dari partai politik yang diikuti oleh pelaku. Dilansir dari portal berita Kompas, salah satu partai politik yang menerima aliran dana dari kasus korupsi ini adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat, melalui Anas Urbaningrum, menggunakan uang tersebut untuk melaksanakan Kongres Partai Demokrat pada tahun 2011-2013. Stimulus berupa tuntutan dari partai politik dalam kasus korupsi E-KTP mendorong pelaku besar lainnya untuk terlibat, karena adanya kebutuhan untuk memenuhi target finansial partai. Kebutuhan dana politik yang besar, terutama dalam mendukung kegiatan seperti kongres, menjadi tekanan yang signifikan

bagi pelaku untuk mencari sumber pendanaan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dari partai politik dapat menjadi stimulus kuat yang memotivasi seseorang melakukan kecurangan untuk mendukung kepentingan organisasi politiknya.

B. Capability

Kapabilitas mengacu pada sifat pribadi dan kemampuan individu yang memungkinkan terjadinya kecurangan, di mana meskipun tekanan, peluang, dan rasionalisasi sudah ada, penipuan besar seperti penipuan laporan keuangan bernilai miliaran dolar hanya bisa terjadi jika orang yang tepat dengan kapabilitas yang memadai mampu memanfaatkan peluang tersebut dan mengeksekusi rencana kecurangan (Vousinas, 2019). Kassem & Higson (2012), dalam menyatakan bahwa kecurangan hanya dapat terjadi jika pelaku memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan peluang yang ada, termasuk posisi, fungsi, dan akses yang memungkinkan mereka mengeksploitasi kelemahan sistem kontrol internal (Muhammad et al., 2021). Kapabilitas berperan penting dalam kecurangan karena mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman individu yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan tindakan penipuan secara efektif. Individu dengan kapabilitas tinggi tidak hanya mampu mengidentifikasi celah dalam sistem kontrol internal, tetapi juga dapat mengembangkan strategi yang cermat untuk menghindari deteksi. Selain itu, kapabilitas ini seringkali disertai dengan karakteristik psikologis seperti kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi, yang memungkinkan pelaku untuk menghadapi situasi berisiko tanpa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan.

Dalam kasus korupsi E-KTP, dalam pemberitaan nasional, terdapat 2 kapabilitas utama yang mempengaruhi para pelaku untuk melakukan korupsi yaitu, membuat pertemuan pribadi di luar rapat dan kapabilitas pelaku untuk melakukan penganggaran pada proyek terkait. Dilansir dari berbagai berita di portal berita Kompas, Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong, yang berperan penting dalam pengadaan dan penganggaran proyek E-KTP, melakukan beberapa kali pertemuan non-resmi di luar rapat resmi DPR-RI di Hotel Gran Melia Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kiat meloloskan program E-KTP dan pembagiannya kepada pihak pihak yang setuju untuk meloloskan program tersebut. Kapabilitas untuk mengadakan pertemuan non-resmi antar pemegang kepentingan memungkinkan para pelaku membahas strategi korupsi secara tertutup, tanpa pengawasan formal atau pencatatan resmi, sehingga memudahkan perencanaan dan pelaksanaan skema korupsi. Pertemuan seperti ini menciptakan ruang untuk menyusun

kesepakatan-kesepakatan rahasia yang tidak dapat dilakukan dalam rapat resmi, di mana transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Selain itu, pertemuan non-resmi ini memperkuat hubungan antara para pelaku, memperlancar koordinasi untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP secara ilegal, dan memastikan dukungan dari pihak-pihak terkait tanpa risiko deteksi publik.

Selain kapabilitas untuk membuat pertemuan mandiri dan non-resmi, kapabilitas untuk membuat anggaran yang sesuai dengan yang diinginkan pelaku korupsi juga dapat menjadi faktor utama dan motivasi utama korupsi E-KTP. Dilansir dari Kompas, salah satu pelaku utama, Irman, mengangkat Sugiharto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian diminta untuk menyetujui harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah digelembungkan. Harga perkiraan sendiri yang telah digelembungkan tersebut akhirnya menjadi dasar pengadaan atas barang atau jasa yang digunakan dalam proyek E-KTP yang semakin mempermudah terjadinya korupsi. Kapabilitas untuk mengatur anggaran sesuai dengan keinginan pelaku korupsi memberikan mereka kendali penuh atas pengelembungan biaya yang dapat dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Dengan mengangkat pejabat yang loyal dan menyetujui harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah digelembungkan, pelaku dapat memastikan bahwa dana proyek dialokasikan secara tidak wajar dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pengaturan anggaran ini juga memperlemah sistem kontrol internal, memungkinkan penyelewengan anggaran tanpa memicu audit atau pengawasan yang ketat, sehingga korupsi dapat berjalan dengan lancar.

C. Opportunity

Kesempatan untuk melakukan kecurangan muncul ketika pelaku percaya bahwa mereka dapat melaksanakan tindakan penipuan tanpa terdeteksi, dan kesempatan ini seringkali dipengaruhi oleh posisi serta wewenang individu di dalam perusahaan, yang memberikan kekuasaan dan kemampuan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem (Vousinas, 2019). Kekuasaan yang dimiliki individu dalam posisi penting memberikan akses langsung ke informasi sensitif dan kontrol atas proses pengambilan keputusan, yang memudahkan penyalahgunaan wewenang tanpa deteksi. Dengan kekuasaan ini, pelaku dapat memanipulasi kebijakan dan prosedur perusahaan untuk menutupi jejak kecurangan mereka, mengurangi risiko terungkapnya tindakan ilegal. Selain itu, individu dengan otoritas tinggi seringkali memiliki jaringan pengaruh yang luas, memungkinkan mereka mempengaruhi orang lain untuk mendukung atau menutupi

tindakan kecurangan, menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk melaksanakan penipuan.

Dalam kasus korupsi E-KTP, dalam pemberitaan nasional, kesempatan utama yang mempengaruhi para pelaku untuk melakukan korupsi adalah posisi para pelaku dalam pelaksanaan mega proyek E-KTP. Dilansir dari portal berita Detik, Kompas, dan BBC, banyak pelaku yang sedang menjabat posisi penting yang memungkinkan para pelaku meloloskan anggaran yang begitu tinggi untuk proyek terkait. Para pelaku korupsi E-KTP yang memegang jabatan pada saat kasus korupsi tersebut antara lain:

- i. Setya Novanto – Ketua DPR RI dan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar.
- ii. Irman – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
- iii. Sugiharto – Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri.
- iv. Andi Agustinus alias Andi Narogong – Pengusaha dan pengatur proyek pengadaan e-KTP.
- v. Anang Sugiana Sudihardjo – Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengadaan e-KTP.
- vi. Markus Nari – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
- vii. Miryam S. Haryani – Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, didakwa memberikan keterangan palsu dalam sidang.
- viii. Johannes Marliem – Direktur Biomorf Lone LLC, penyedia teknologi biometrik untuk proyek e-KTP.
- ix. Diah Anggraini – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- x. Made Oka Masagung – Pengusaha dan rekan Setya Novanto, yang diduga menerima aliran dana dari proyek e-KTP.
- xi. Dirwan Ahmad – Anggota konsorsium dalam proyek pengadaan e-KTP.
- xii. Paulus Tannos – Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, salah satu perusahaan dalam konsorsium proyek e-KTP.
- xiii. Isnu Edhi Wijaya – Mantan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
- xiv. Farhat Abbas – Pengacara yang diduga terkait dengan kasus ini, meskipun keterlibatannya tidak sebesar terdakwa lain.

Kesempatan berupa posisi penting yang dimiliki para pelaku dalam proyek e-KTP memberikan akses langsung terhadap pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis, sehingga memudahkan mereka untuk

menyalahgunakan wewenang. Dengan jabatan tersebut, mereka memiliki kendali atas proses administrasi dan pengadaan barang, yang memungkinkan manipulasi proyek tanpa pengawasan yang ketat. Selain itu, posisi ini memberi mereka jaringan yang luas dan pengaruh kuat dalam struktur organisasi, yang dapat dimanfaatkan untuk mengamankan dukungan dari pihak lain dalam upaya menutupi praktik korupsi tersebut.

D. Rationalization

Rasionalisasi mengacu dengan pembenaran atas tindakan penipuan, di mana pelaku menganggap diri mereka orang jujur dan menggunakan alasan seperti "akan mengembalikan uangnya nanti" atau "saya berhak mendapatkannya" untuk membuat tindakan mereka tampak lebih dapat diterima (Vousinas, 2019). Rasionalisasi dalam fraud pentagon merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan pelaku penipuan merasa tindakan mereka dapat dibenarkan. Pelaku penipuan sering kali menciptakan alasan untuk mengurangi rasa bersalah, seperti meyakini bahwa tindakan tersebut bersifat sementara atau tidak akan merugikan siapa pun. Mereka juga mungkin merasa berhak atas kompensasi lebih karena merasa perusahaan tidak memberikan imbalan yang layak. Dengan membentuk pembenaran ini, pelaku dapat melakukan penipuan tanpa merasakan tekanan moral yang signifikan, yang pada akhirnya memfasilitasi tindakan ilegal tersebut.

Dalam kasus korupsi E-KTP, dalam pemberitaan nasional, pelaku tidak secara langsung mengucapkan rasionalisasi atas tindakan korupsi yang dilakukan. Dilansir dari portal berita Kompas, dalam persidangan pelaku korupsi E-KTP, kebanyakan pelaku menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut dan berusaha memberikan alasan dan rasionalisasi berbelit-belit. Dalam kasus korupsi E-KTP, pelaku sering kali tidak secara langsung mengakui tindakan mereka, tetapi justru menghindari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat. Mereka memberikan alasan-alasan yang berbelit-belit untuk membenarkan tindakan mereka atau mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan upaya rasionalisasi, di mana pelaku berusaha untuk meminimalisir keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi meskipun bukti yang ada menunjukkan sebaliknya.

Namun, dalam beberapa literatur, seperti dalam literatur milik Setiadi (2018), Lestari (2017), dan Jamillah (2015), Indonesia dinyatakan memiliki iklim politik yang sudah tidak asing dalam korupsi. Korupsi sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajib dilakukan oleh pejabat publik. Pernyataan tersebut mencerminkan bentuk rasionalisasi yang digunakan oleh pejabat untuk membenarkan tindakan korupsi

mereka. Pejabat publik merasa bahwa karena praktik korupsi sudah menjadi kebiasaan di lingkungan politik, tindakan mereka tidak berbeda dari yang lain dan dianggap wajar. Dengan anggapan bahwa korupsi adalah hal lumrah, pelaku merasa tidak bersalah atau menganggapnya sebagai bagian dari mekanisme untuk bertahan dalam sistem politik yang korup, sehingga melanggengkan tindakan tersebut.

E. **Ego**

Teori-teori psikologi, seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, berpendapat bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh proses mental dan motivasi bawah sadar, dengan kepribadian manusia terdiri dari tiga bagian: id (dorongan dasar), superego (hati nurani), dan ego (penengah antara keinginan, moral, dan realitas) (Vousinas, 201). Ego dalam fraud pentagon berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan pelaku penipuan menyeimbangkan antara dorongan pribadi dan norma sosial yang harus dipatuhi. Pelaku penipuan menggunakan ego untuk menjustifikasi tindakan mereka, dengan mengabaikan batasan moral (superego) dan memenuhi keinginan pribadi (id) tanpa merasa bersalah. Ego juga membantu pelaku beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang memungkinkan penipuan, sehingga mereka bisa berfungsi dan melakukan penipuan dengan merasionalisasi tindakan mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus E-KTP, dilansir dari *website* antikorupsi.org, salah satu pelaku utama kasus tersebut, Setya Novanto, merupakan salah satu pejabat publik yang telah sering disangkut pautkan dengan kasus mega korupsi di Indonesia. Setya Novanto terlibat dalam beberapa kasus selain e-KTP, namun tidak langsung tertangkap. Pada tahun 2015, ia terseret dalam skandal "Papa Minta Saham" terkait dugaan permintaan saham dari PT Freeport Indonesia, yang memaksanya mundur sebagai Ketua DPR meskipun tidak dikenakan sanksi hukum karena kurangnya bukti kuat. Selain itu, ia juga dikaitkan dengan dugaan suap dalam penganggaran proyek PON Riau 2012, namun tidak ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 1999, namanya muncul dalam skandal Cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar, namun Novanto tidak dijerat hukum dalam kasus tersebut. Ego Setya Novanto yang terus merasa aman dan tidak tersentuh hukum meskipun namanya berulang kali dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi menjadi salah satu faktor yang mungkin mendorong terjadinya kasus korupsi e-KTP. Ketidakmampuan penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepadanya dalam kasus-kasus sebelumnya, seperti skandal Freeport, PON Riau, dan Bank Bali, tampaknya memperkuat keyakinannya bahwa ia bisa lolos dari jerat hukum. Rasa kebal

hukum ini membuatnya merasa leluasa dalam memanipulasi proyek e-KTP, yang akhirnya menyebabkan kerugian negara besar-besaran. Dengan rekam jejak tidak pernah tertangkap, Setya Novanto menganggap dirinya tak tersentuh, sehingga semakin berani terlibat dalam praktik korupsi berskala besar seperti kasus e-KTP.

SIMPULAN

Kasus korupsi skandal E-KTP menunjukkan bahwa kasus ini merupakan salah satu contoh nyata dari praktik korupsi yang terorganisir di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp 2,31 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun. Keterlibatan elit politik seperti Setya Novanto, berbagai pejabat tinggi, dan pengusaha memperlihatkan betapa mendalamnya akar korupsi dalam struktur pemerintahan. Melalui analisis S.C.O.R.E Model yang memiliki 5 elemen kunci, yaitu Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, dan Ego, terungkap bahwa faktor-faktor seperti dorongan untuk memperkaya diri sendiri, tuntutan dari partai politik, kapabilitas individu dalam mengatur anggaran dan pertemuan, serta kesempatan yang muncul dari posisi strategis, berkontribusi pada terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, rasionalisasi dan ego para pelaku juga memainkan peran penting dalam membenarkan tindakan ilegal mereka. Keseluruhan kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem kontrol internal dan transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abanat, Satria Angga Trilang, Petrus Ana Andung, and Veki Edizon Tuhana. "Kredibilitas Pemberitaan Media Vice Indonesia (Analisis Isi berita Pada Media Online Vice.com/id)." *Jurnal Semiotika* 17, no. 2 (2023): 120-136.
- Achmad, Tarmizi, Imam Ghozali, and Imang Pamungkas. "Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia." *Economics* 10, no. 13 (2022).
- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *Research Gate* 5, no. 9 (2018): 1-20.
- Akbar Maraendar, et al. "Analisis Dampak Dan Solusi Kasus Korupsi E-Ktp Terhadap Perekonomian Dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5, no. 1 (2024).
- Angelina, Claudia, and Natalis Christian. "Analisis Teori Fraud Pentagon S.C.O.R.E Method Dalam Mendeteksi Fraud Pada Laporan Keuangan Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 1423-1434.

- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis." *Alhadharah-Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 32-48.
- BBC. "Kasus E-KTP: Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara, denda, dan pencabutan hak politik lima tahun." 2018.
- Binus University. *Fraud Pentagon: Pengembangan Dari Fraud Diamond Dan Triangle*. 27 April 2020. <https://accounting.binus.ac.id/2020/04/27/fraud-pentagon-pengembangan-dari-fraud-diamond-dan-triangle/>.
- Egeham, Lizsa. "Alasan KPK Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus E-KTP." 2017.
- Grabilin, Abba. ""Uang Korupsi E-KTP Digunakan untuk Biaya Akomodasi Kongres Partai Demokrat." *Kompas*, 2017.
- Hamidah Dewi Anggraini, Pupung Purnamasari, and Nopi Hermawati. "Pengaruh Audit Investigatif dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan." *jurnal Jurnal Riset Akuntansi (JRA)Unisba* 3, no. 2 (2023): 123-128.
- Hidayat, Faiq. "Novanto Beberkan Alasan Para Anggota DPR Dapat Jatuh Duit e-KTP." *Detik*, 2018.
- Hidayat, Faiq, and Haris Fadhil. "Terbukti Korupsi e-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara." *Detik*, 2018.
- Indonesia Corruption Watch. "Report on 2023 Corruption Trends Monitoring Result." *ICW*. 2 June 2024. <https://www.icw.or.id/en/report-2023-corruption-trends-monitoring-result> (accessed October 22, 2024).
- Jamillah, Jamillah. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015).
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications, 2004.
- Lestari, Yeni. "Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia." *PANDECTA* 12, no. 1 (2017).
- Maraendar, Akbar, et al. "ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI KASUS KORUPSI E-KTP TERHADAPPEREKONOMIAN DAN DEMOKRASI INDONESIA." *Jurnal LingkarPembelajaran Inovatif* 5, no. 1 (2024): 109-115.
- Mohammad Iqbal, and Helianti Utami. "Studi Fenomenologi: Audit Investigasi dalam Pengungkapan Fraud." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 15, no. 2 (2024).
- Movanita, Ambranie. "Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP." *Kompas*, 2017.

- Muhammad, Norazida, Nor Zakaria, Nur Nazip, and Nor Muhammad. "THE INFLUENCING FACTORS OF EMPLOYEE FRAUD IN MALAYSIAN FINANCIAL INSTITUTION: THE APPLICATION OF THE FRAUD PENTAGON THEORY." *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. 6 (2021).
- Novita, Nova. "Teori Fraud Pentagon dan Deteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 11, no. 2 (2019): 64-73.
- Putra, Yudi Partama. "Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Menggunakan Fraud Score Model." *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 1 (2022).
- Rachman, Dylan, and Krisniadi. "Diperiksa KPK, Ganjar Pranowo Ditanya soal Pembahasan Anggaran E-KTP." *Kompas*, 2019.
- Rahmat Aiman. "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *jurnal Peradaban Journal of law and society* 3, no. 1 (2024): 16-20.
- Retaduri, Elza. ""Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto"." *Kompas*, 2022.
- "Rugikan Negara Rp2,3 T, 2 Terdakwa Korupsi E-KTP Divonis 4 Tahun Penjara." *Kompas TV*, 2022.
- Sahla, Widya Ais, and Ardianto Ardianto. "Ethical Values and Auditors Fraud Tendency Perception: Testing of Fraud Pentagon Theory." *Journal of Financial Crime* 30, no. 4 (2023): 966-982.
- Sartika, Elita. "Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul "Kita Versus Korupsi"." *EJournal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2014): 63-77.
- Setiadi, Wicipto. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018.
- Sovianti, Rina. "Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com." *E-Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sundari Sapitri, and Natasya Adelia Putri. "Pengaruh Audit Investigasi, Independensi Terhadap Pengungkapan Fraud." *jurnal Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2024): 159-164.
- Transparency International Indonesia. *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023*. 2024. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>.
- Ulfah, Maria, Elva Nuraina, and Anggita Langgeng Wijaya. "Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Perbankan Di

Indonesia Yang Terdaftar di BEI." *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 399-418.

Vousinas, Georgius L. "Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model." *Journal of Financial Crime* 26, no. 1 (2019).